

BAB IV

Pardigma Pembangunan dan Masalah Gender dalam Developmentalisme

Pardigma Pembangunan

Parwoto (PNPM Mandiri Perkotaan: 6-10) dalam *Modul Dasar Komunitas: Tantangan Penanggulangan Kemiskinan*¹ menjelaskan bahwa kata paradigma berasal dari Yunani, semula lebih merupakan istilah ilmiah dan sekarang lebih lazim digunakan dengan arti model, teori dasar, persepsi, asumsi atau kerangka acuan. Dalam bahasa sehari-hari paradigma juga disebut sebagai “cara kita memandang dunia”, bukan dalam arti visual tetapi lebih dalam arti mempersepsi, mengerti atau menafsirkan (Stephen R Covey. 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif).

¹ PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan di zaman pemerintahan SBY mulai tahun 2007 sebagai kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Sekarang, program ini bertransformasi menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (Program KOTAKU) pada pemerintahan Jokowi.

▪ **Pengantar**

Lebih lanjut “paradigma” adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangan seseorang. Konsekwensinya paradigma ini juga akan membentuk citra subyektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita.

Paradigma adalah sumber dari sikap dan perilaku seseorang, berkenaan dengan tindakan mempersepsi, memahami dan menafsirkan sesuatu hal. Dengan kata lain manakala seseorang menguraikan sesuatu yang dilihat atau dialami, sebenarnya orang tersebut sedang menguraikan pandangannya/anggapannya mengenai hal tersebut atau sebenarnya dia sedang menjabarkan dirinya sendiri, citra subyektifnya, persepsinya, pandangannya yang dilandasi oleh paradigmanya. Penafsiran masing-masing orang tentang sesuatu hal menggambarkan pengalaman orang tersebut sebelumnya.

Semakin sadar seseorang akan paradigmanya yang dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya, maka semakin orang tersebut bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi akibat paradigma yang dianutnya. Dia akan makin terbuka dan terus menguji paradigmanya berdasarkan realita baru yang ditemuinya, mendengarkan orang lain dan bersikap terbuka terhadap persepsi orang lain, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih besar dan pandangan yang lebih obyektif sehingga yang terjadi kemudian adalah penguatan atau justeru perubahan paradigma.

Peta Sosial ekonomi Ummat

Perubahan paradigma menggerakkan seseorang untuk beralih dari satu cara pandang ke cara pandang yang lain. Perubahan paradigma bersifat kuat. Paradigma seseorang, terlepas dari benar atau salah, adalah sumber dari sikap dan perilakunya, yang akhirnya akan menjadi sumber dari hubungan orang tersebut dengan orang lain.

Hampir setiap terobosan penting di dalam berbagai bidang kehidupan, pada mulanya merupakan pemutusan dengan tradisi, cara berpikir dan paradigma yang lama. Perlu juga selalu diingat bahwa tidak semua perubahan paradigma memiliki arah positif dan tidak semua perubahan paradigma terjadi seketika.

- **Pergeseran Paradigma Pembangunan**

Secara singkat dan sederhana terjadinya pergeseran paradigma global didunia ini dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

- i. *Paradigma Ekonomi*

Paradigma ekonomi merupakan yang paling tua dan paling dominan dalam menentukan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh pengertian ekonomi itu sendiri sebagai “mengatur rumah tangga sendiri” yang dapat dipahami sebagai upaya mengatur kesejahteraan keluarga, komunitas dan bangsa dalam skala yang lebih luas. Pada awalnya (ekonomi klasik) paradigma ini menekankan pertumbuhan dan melihat pembangunan sebagai pembangunan ekonomi (*development economic development*) sehingga ukuran keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan produksi barang dan jasa secara nasional (Produksi Nasional Bruto/Gross National Product). Makin tinggi

Peta Sosial ekonomi Ummat

pertumbuhannya makin berhasil pembangunan suatu bangsa/negara. Paradigma ini juga menekankan perlunya kebebasan, pemupukan modal dan pembagian kerja (spesialisasi). Kelompok yang tidak puas dengan paradigma ini kemudian melakukan pembaruan yang kemudian dikenal dengan Neo Ekonomi yang lebih menekankan pada pemerataan dengan mengukur berapa % dari PNB/GNP diraih oleh penduduk miskin. Meskipun paradigma neo-ekonomi ini masih sangat jelas dipengaruhi nilai-nilai ekonomi klasik, tetapi ada beberapa perbedaan yang fundamental dalam indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan dan makna pertumbuhan itu sendiri. Paradigma neo-ekonomi menggunakan indikator dalam mengukur pembangunan sebagai berkurangnya kemiskinan, pengangguran dan berkurangnya kesenjangan. Masih dalam paradigma ekonomi ini muncul juga pandangan (ekonomi politik neo klasik) yang melihat hubungan antara masyarakat maju (kapitalis) dengan masyarakat yang belum maju (pra kapitalis) yang melahirkan eksploitasi dari masyarakat maju kepada masyarakat belum maju sehingga yang terjadi adalah keterbelakangan (*underdevelopment*) dari masyarakat yang belum maju. Meskipun sudah banyak perubahan dalam paradigma ekonomi tetapi perkara utamanya tetap pertumbuhan dan pemerataan dipercayakan melalui mekanisme penetesanan (*trickle down effect*).

ii. Paradigma Kesejahteraan Sosial

Pada awalnya paradigma kesejahteraan sosial ini melihat pembangunan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Peta Sosial ekonomi Ummat

Indikator pembangunan diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar, seperti antara lain MASOL (*Minimum Acceptable Standard of Living*) yang dikembangkan oleh Doh Joon Chien atau PQLI (*Physical Quality Life Index*) yang sedikit lebih maju dengan mengukur harapan hidup, kematian bayi dan melek huruf sampai dengan yang lebih canggih yang melihat pembangunan sebagai upaya terencana untuk memenuhi kebutuhan sosial yang lebih tinggi, bukan berapa banyak, tetapi berapa baik, bukan kualitas barang tetapi kualitas hidup seperti antara lain keadilan, pemerataan, peningkatan budaya, kedamaian, dsb. (Bauer, 1966; Conyers, 1986). Meskipun telah terjadi banyak perkembangan tetapi perkara utama paradigma ini masih tetap pemenuhan kebutuhan hidup sehingga sering dikritik “mendudukkan masyarakat sebagai obyek bantuan” (Freire, 1984).

iii. Paradigma Pembangunan Manusia

Melihat pembangunan sebagai pembangunan manusia untuk mampu berbuat dan menciptakan sejarahnya sendiri. Manusia sebagai fokus utama dan sumber utama pembangunan (Korten). Penghormatan terhadap martabat manusia, pembebasan manusia dari dominasi teknologi (*Illich*), pembebasan manusia dari dominasi pasar (*Ramos*), pembangunan manusia; kelangsungan hidup, kehormatan dan kebebasan (*Goulet*), pembebasan manusia dari dominasi manusia lain melalui proses penyadaran diri (*Freire*). Fokus pembangunan bukan lagi pada ekonomi, social atau teknologi melainkan pada manusia itu sendiri.

Peta Sosial ekonomi Ummat

... a sense of self worth and a personal capacity for actively participating in life's important decision ...

... social development become the liberation of human being and community from passive recipients towards a developed, active citizenry, capable of participating in in choice about community issues (Thomas, 1984).

Penganut-penganut teori ini adalah Ivan Illich, Denis Goulet, Mahbub ul Haq, Freire, Guerreiro Ramos, David Korten, dsb. Pergeseran paradigma seperti tersebut di atas bergerak dari paradigma ekonomi ke paradigma kesejahteraan sosial akhirnya ke paradigma pemanusiaan. Pembangunan menurut kedua paradigma terdahulu (ekonomi dan kesejahteraan sosial) adalah pembangunan yang berkiblat ke manusia, sedangkan pembangunan menurut paradigma pemanusiaan adalah pembangunan manusia itu sendiri untuk menjadi manusia yang utuh dan merdeka atau secara ekonomi produktif dan secara sosial efektif (Soedjatmoko).

▪ **Pergeseran Paradigma Pembangunan di Indonesia**

Pergeseran paradigma global tersebut juga terjadi di Indonesia, dari Repelita ke Repelita sampai ke Propenas.

i. Repelita I (1979-1974)

Kita baru saja lepas dari musibah nasional G 30 S sehingga nuansa yang dominan mempengaruhi paradigma pembangunan adalah keamanan dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan stabilitas, sehingga Trilogi Pembangunan dimulai dari Stabilitas, Pertumbuhan dan baru Pemerataan. Peran utama pemerintah adalah menciptakan suasana aman dan stabil.

ii. Repelita 2 (1974-1979)

Pada waktu itu suasana sudah cukup tenang dan stabil sehingga mulai berkembanglah paradigma ekonomi untuk memperbesar kue pembangunan dengan meningkatkan pertumbuhan. Trilogi Pembangunan dengan serta merta diubah urutannya dari Stabilitas, Pertumbuhan dan Pemerataan menjadi Pertumbuhan, Stabilitas dan Pemerataan. Dengan menerapkan pendekatan pertumbuhan ini berarti prioritas pembangunan diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang dianggap dapat menjamin terjadinya pertumbuhan, termasuk prioritas pilihan model dan pelaku pembangunan yang akhirnya jatuh ke sector formal yang dianggap paling mampu menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan. Pada masa inilah merupakan masa kebangkitan sector formal dengan konsekwensi logic terpinggirkannya sector informal baik kegiatannya maupun pelakunya dengan akibat turutannya dari proses marginalisasi ini adalah kesenjangan dan keterbelakangan. Pintu terjadinya kemiskinan structural terbuka lebar.

iii. Repelita 3 (1979-1984) s/d Repelita 5 (1989-1994)

Berangkat dari situasi menganganya jurang kesenjangan, keterbelakangan dan munculnya banyak OKB (orang kaya baru) dan diwarnai dengan banyak protes maka Repelita 3 dirumuskan dengan landasan paradigma yang jauh berbeda yaitu “kesejahteraan sosial” dalam rangka menutup jurang kesenjangan dan keterbelakangan sebagai upaya koreksi terhadap kesalahan pembangunan di masa sebelumnya.

Peta Sosial ekonomi Ummat

Pendekatan yang digunakan adalah “pemerataan”, sehingga dengan serta merta Trilogi Pembangunan urutannya juga diubah dari Pertumbuhan, Stabilitas dan Pemerataan menjadi Pemerataan, Pertumbuhan dan Stabilitas. Muncullah waktu itu “8 Jalur Pemerataan” yang harus dianut oleh semua instansi dalam mengajukan anggaran biaya pembangunan. Dalam prakteknya pemerataan ini lebih diartikan sebagai pemerataan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan dalam bentuk pelayanan kebutuhan dasar, air bersih, SD Inpres, dsb, dimana masyarakat didudukkan sebagai penerima manfaat yang pasif (obyek bantuan, Freire, 1984). Untuk mengurangi ketimpangan ini kemudian dimunculkan upaya untuk menggalakkan lagi partisipasi masyarakat melalui instruksi Menteri Dalam Negeri dan diterapkannya mekanisme perencanaan dari bawah yang dikenal sebagai P5D. Dalam prakteknya semua gagasan yang indah ini tidak diterapkan sepenuh hati. Malah pergeseran paradigma ini tidak pernah secara sistematis dibahas apa pengaruhnya terhadap pembangunan daerah, posisi masyarakat dan perubahan peran para pelaku pembangunan. Akibatnya alih-alih mengurangi kesenjangan yang terjadi justru; (i) pemerataan terbatas pada apa yang disebut pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan, (ii) merebaknya semangat “project oriented” yang melanda semua pelaku pembangunan, sehingga tupoksi tidak jalan karena tidak ada proyek dan tumbuhnya para konsultan maupun kontraktor yang bermental ABS (asal babak senang), (iii) merebaknya

Peta Sosial ekonomi Ummat

semangat apatisme dari masyarakat sebagai penerima manfaat proyek, masyarakat menjadi pasif tinggal menunggu saja, (iv) yang sangat menyedihkan adalah justeru kesenjangan makin melebar karena justeru yang menikmati pembangunan adalah pelaku pembangunan (kaum elit) dan bukan pemanfaat (rakyat jelata). Situasi tersebut menunjukkan bahwa yang sangat parah terpengaruh dengan model pembangunan repelita demi repelita dalam masa PJP I adalah mentalitas manusianya, terjadi proses pembodohan, dehumanisasi dan luntarnya nilai-nilai luhur universal (demoralisasi). Marjinalisasi makin keras dan keterbelakangan makin nyata.

iv. *Awal PJP II dan Masa Reformasi dgn Propenas (1999-2004).*

Hal tersebut di atas yang terjadi selama masa PJP I juga disadari dan dilakukan koreksi pada masa pembangunan jangka panjang kedua. Pada waktu Repelita 6 (1994-1999). Kesadaran akan akibat-akibat negatif dari model pembangunan sebelumnya telah membawa model pembangunan yang sangat lain yang dilandasi “paradigma pembangunan manusia” melalui pendekatan pemberdayaan. Dimana urutan prioritas Trilogi Pembangunan tetap Pemerataan, Pertumbuhan dan Stabilitas hanya maknanya berubah dari pemerataan hasil pembangunan menjadi pemerataan kesempatan membangun. Sayangnya penerapan paradigma ini dalam model-model pembangunan kurang dihayati dan kurang tulus dilaksanakan. Setelah pergantian pemerintahan maka Repelita tidak diberlakukan lagi dan

Peta Sosial ekonomi Ummat

disusunlah Propenas (Program Pembangunan Nasional) 1999-2004 dengan tujuan jangka panjangnya adalah : “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hokum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin”.

Prioritas Pembangunan ditetapkan sebagai berikut: 1) Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan 2) Mewujudkan supremasi hokum dan pemerintahan yang baik 3) Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan system ekonomi kerakyatan 4) Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya 5) Meningkatkan pembangunan daerah.

Dari judul prioritas pembangunan yang dicanangkan melalui Propenas jelas prioritas pembangunan manusia menjadi kabur atau melemah padahal persoalan utama yang kita hadapi sebenarnya adalah adanya krisis moral dan kepemimpinan yang mampu menjadi teladan pelaku moral. Disisi lain secara umum terlihat pengaruh paradigma ekonomi dan kesejahteraan social sangat kuat, mungkin ini adalah dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan, tetapi

jelas tanpa pembangunan manusia dari aspek kritis manusia tidak mungkin dicapai prioritas pembangunan di atas sebab semuanya itu memerlukan pelaku yang memiliki komitmen moral yang tinggi yang mampu menjadi teladan bagi sesama.

Masalah Gender dalam Developmentalisme

Masalah gender dalam developmentalisme (Fakih, 2000: 99-94) bahwa developmentalisme juga menghasilkan pelanggaran penindasan perempuan di Dunia Ketiga. *Women in Development* (WID) sebagai bagian utama developmentalisme dirancang untuk mendorong keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan, dan tidak mempersoalkan manifestasi ketidakadilan dan diskriminasi gender. Oleh karena itu program WID lebih mengakibatkan pengekanan dan penjinakkan, ketimbang pembebasan, kaum perempuan di Dunia Ketiga. Tanpa mempertanyakan masalah gender, upaya-upaya program dan pembangunan perempuan apa pun tidak akan berhasil memunculkan masalah utama kaum perempuan.

Ada beberapa kajian yang telah dilakukan tentang isu dan masalah perempuan di Dunia Ketiga. Beberapa peneliti memfokuskan kepada perspektif ekonomi dan politik serta menggunakan analisis kelas untuk memahami marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan penindasan kaum perempuan di Dunia Ketiga (Stamp, 1989; Boserup, 1970). Peneliti lain menggunakan kerangka kerja alternatif untuk memahami perempuan dan isu-isu di

Dunia Ketiga, misalnya kerangka kerja diskursus dan produksi pengetahuan (Mueller, 1987); kerangka kerja dominasi kultural yang berkaitan dengan isu kealaman dan lingkungan (Shiva, 1989); maupun banyak perspektif feminis lainnya.

Tetapi beberapa di antara peneliti itu, sejauh penulis ketahui, benar-benar melihat isu perempuan dengan menggunakan analisis dialektis atau overdeterminis. Karena masalah perempuan di Dunia Ketiga tidak sederhana maka dibutuhkan pendekatan yang komprehensif. Alasan penggunaan pendekatan dialektis atau overdeterminisme dalam menilai isu perempuan adalah untuk menghindari penyederhanaan yang berlebihan dalam memahami masalah perempuan dan guna menjauhi pendekatan esensialis dan reduksionis. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan dialektika adalah bahwa permasalahan perempuan tidak dapat dipahami hanya dengan dan melalui satu perspektif, misalnya analisis kelas atau ekonomi, tetapi membutuhkan analisis ekonomi-politik, dominasi kultural, penindasan politik, ketidakadilan gender dan kerusakan alam yang saling terkait dan overdeterminasi.

Untuk memahami dominasi terhadap perempuan di Dunia Ketiga, bagian ini akan memusatkan analisis kepada konsep "*Women in Development*" (WID). Alasan mendudukan WID sebagai sasaran analisis didasarkan pada asumsi bahwa seseorang tidak dapat memahami isu-isu perempuan Dunia Ketiga, tanpa mempertimbangkan agenda WID. Memandang isu-isu perempuan dalam Pembangunan dengan menggunakan perspektif dialektis berarti menggunakan analisis politik, ekonomi, sosial dan alam untuk melihat pembangunan. Dengan kata lain, studi ini memandang isu perempuan dalam konteks Pembangunan dari beberapa lensa,

misalnya dengan menggunakan analisis kelas ekonomi Marxian, analisis kekuasaan dan diskursus Foucaultian, analisis hegemoni kultural dan politik Gramscian dan analisis Ekofeminisme maupun analisis feminis lainnya. Analisis ini, tidak mewujud secara independen, tetapi saling terkait.

Titik berat perhatian bagian ini adalah dominasi perempuan dan hubungannya dengan konsep WID, yang mengasumsikan bahwa WID adalah bagian dari Developmentalisme. Sementara Pembangunan menjadi "agama baru" bagi berjuta-juta rakyat, WID juga menjadi "satu-satunya" kebijakan resmi yang berkenaan dengan perempuan di sebagian besar bangsa Dunia Ketiga. Kebijakan ini memberi janji-janji kepada berjuta-juta perempuan di Dunia Ketiga. WID dimulai pada awal 1970an ketika ada peningkatan tekanan yang diletakkan pada peran perempuan dalam pembangunan ekonomi internasional. Diskursus WID dimulai ketika pemerintah AS *mengumumkan the Percy Amendment* bagi Undang-undang Bantuan Luar Negeri 1973 yang menetapkan perhatian khusus kepada perempuan dalam program Pembangunan internasional. Amandemen AS ini mempengaruhi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1974 ketika PBB menetapkan Dasawarsa Perempuan 1976-1985). Departemen WID dalam *Agency for International Development* (AID) juga dibentuk pada 1974, dan sejak itu banyak pengetahuan, kebijakan, sumber daya dan informasi yang diciptakan dan dimasukkan ke dalam kehidupan berjuta-juta perempuan bangsa Dunia Ketiga. WID adalah jawaban bagi kritik-kritik yang ditujukan kepada Developmentalisme ketika Developmentalisme didakwa telah mengabaikan perempuan dalam proses Pembangunan.

Bagaimana Developmentalisme, khususnya Revolusi Hijau, melanggengkan peran dan posisi ketertindasan perempuan di Dunia Ketiga? Beberapa studi mengungkapkan bahwa kaum perempuan di kawasan pedesaan telah menjadi korban Revolusi Hijau. Contohnya, secara tradisional kaum perempuan di Jawa memiliki peran penting dalam produksi pangan, khususnya selama masa pemanenan. Masa pemanenan sebagai ketja yang sangat intensif dari seluruh kegiatan pertanian, memerlukan pasokan buruh dalam jumlah banyak pada periode yang terkonsentrasi itu. Kebanyakan perempuan, terutama dalam rumah tangga yang lebih miskin, mendukung keluarganya dengan menyerahkan dirinya sendiri guna melakukan pemanenan dan kerja pertanian lainnya. Beberapa kajian melaporkan bahwa, pada umumnya, dalam rumah tangga tenniskin kaum perempuan memberi sumbangan relatif paling besar kepada subsistensi, dan sumbangan mereka diakui oleh seluruh anggota keluarga dengan sangat eksplisit. Peran perempuan merupakan hal krusial bagi produksi beras, bukan saja dalam hal jam ketja, tetapi juga dalam hal intensitas dan pengaturan waktu pada periode kegiatan tersibuk. Tetapi, sejak Revolusi Hijau, yang secara sistematis memakai tipe padi baru dan teknologi baru yang diperkenalkan oleh program itu, telah mengubah peran dan kerja perempuan di pedesaan Jawa. Meskipun input buruh perempuan dari seluruh buruh per hektar lebih besar ketimbang buruh laki-laki, program Revolusi Hijau telah mengganti peran perempuan dengan teknologi yang dikontrol oleh kaum laki-laki.

Banyak analisis Marxian tentang posisi perempuan memusatkan perhatiannya kepada posisi perempuan yang lebih dikaitkan dengan sistem ekonomi, ketimbang menekankan perhatian pada hubungan

gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, perempuan dianggap sebagai bagian dari kelas buruh, yang berarti secara konsisten menempatkan perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki di bawah hubungan buruh dengan modal. Penulis akan menggunakan lagi program Revolusi Hijau sebagai studi kasus untuk menjelaskan pendekatan ini.

Pengenalan perekonomian uang tunai (*cash economy*), dan pengejaran kepastian individu melalui akumulasi kekayaan materi yang dikembangkan oleh Revolusi Hijau disalurkan melalui kaum laki-laki. Pola umum program Revolusi Hijau adalah membantu keluarga petani melalui "kepala rumah tangga" yang diklasifikasikan sebagai laki-laki, sekali pun secara fisik ia tidak ada di rumah. Program Revolusi Hijau jarang sekali memasukkan perempuan dalam pelatihan produksi beras, meskipun faktanya menunjukkan bahwa input kerja dalam produksi beras disumbangkan oleh perempuan. Kaum perempuan acapkali bertanggung jawab atas pemeliharaan babi dan ayam di halaman belakang, tetapi mereka tidak diakui sebagai pemelihara peternakan. Meski faktanya sangat diketahui bahwa kaum perempuan secara aktif terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi pertanian, dan hampir selalu menguasai pemasaran hasil-hasil pertanian, mereka tidak pernah menjadi sasaran utama program-program Revolusi Hijau. Melalui Revolusi Hijau, petani (laki-laki) Jawa masuk ke dalam cara produksi kapitalis, dan hubungan ini mempengaruhi hubungannya dengan istrinya. Dalam proses hubungan kelas fundamental ini, pemilik tanah atau petani kapitalis mengambil nilai lebih dan membagikan sebagian nilai lebih itu kepada kelas menengah perantara lainnya seperti negara (pajak), bankir, tuan tanah dan

lain-lain. Para petani tak bertanah lalu pulang ke rumah dan menyerahkan sebagian upahnya kepada istrinya. Hubungan antara petani tak bertanah dan perempuan berlangsung dalam cara produksi feodalistik yaitu, dengan kata lain, petani tak bertanah membeli perempuan untuk melayani keluarganya.

Dampak lain terhadap perempuan yang diakibatkan oleh hubungan kapitalis di kawasan pedesaan adalah penghapusan hak mereka atas tanah di pedesaan negara-negara Dunia Ketiga. Boserup menjelaskan, bahwa di Asia Selatan, pemerintahan kolonial dan pascakolonial secara jelas mengalihkan hak-hak tanah perempuan kepada laki-laki seperti yang teramati di Afrika. Di kalangan keluarga matrilineal di Malaya masa kolonial, misalnya, banyak tanah yang secara tradisional diwariskan dari ibu kepada anak perempuannya.

Bahkan setelah WID diperkenalkan, perempuan pedesaan di negeri-negeri Dunia Ketiga justru terjerat oleh dunia kapitalis internasional. Mies (1986) mengusulkan bahwa WID harus dipandang sebagai satu komponen dalam pembagian kerja yang kompleks dan hirarkis yang mengatur kerja internasional, komoditas, dan pasar modal dalam tata dunia kapitalis." Di sini perempuan dianggap memiliki peran reproduktif dalam kelas buruh. Keberadaan proses kelas utama dalam cara produksi kapitalis juga memerlukan pasokan buruh murah. Dengan demikian, dalam konteks ini, WID memobilisasi kaum perempuan dalam pertanian pedesaan kapitalis maupun pasar dan produksi pangan internasional: Akhirnya, masalah eksploitasi perempuan di Dunia Ketiga tidak berdiri sendiri. Masalah itu berkaitan dengan masalah politik, kultural dan psikologis lainnya. Ini mengingatkan penulis pada apa yang dikatakan Mao Zedong

Peta Sosial ekonomi Ummat

tentang kaum perempuan Afrika. Ia menyatakan bahwa kaum perempuan Afrika memanggul enam gunung di punggungnya: pertama dan kedua adalah penindasannya oleh neokolonialisme dan struktur tradisional; ketiga adalah keterbelakangannya, keempat adalah seorang laki-laki, kelima adalah warna kulit ras: dan keenam adalah, tidak kurang pentingnya, dirinya sendiri. Perempuan menderita karena citra gender yang negatif, dari zaman yang menginternalisasikan ideologi patriarki dan birarei gender.

Penerapan WID secara luas di Dunia Ketiga, memperlihatkan dominasi paradigma Pembangunan Barat, yakni Modernisasi. WID sebagai bagian dari Pembangunan, mampu menciptakan konsep realitas bagi perempuan yang dipecah di semua masyarakat dalam seluruh kelembagaan dan kehidupan pribadinya. Dalam konteks Pembarigunan, WID kemudian digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan hegemoni kapitalis kepada masyarakat yang lebih luas di Dunia Ketiga. Modernisasi menekankan peran penting keluarga dalam penyebaran hegemoni kapitalis. Keluarga ditempatkan dalam kerangka hubungan sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang memperkuat tata dunia kapitalis.

WID sebagai bentuk pengetahuan tentang perempuan Dunia Ketiga, juga diciptakan melalui organisasi sosial diskursus Pembangunan sebagai bagian dari projek untuk membawa penduduk baru di bawah aturan disiplin kapitalis maju. Dalam konteks ini, tampak bahwa pengetahuan dan diskursus menjadi alat dominasi. Diskursus dan pengetahuan WID tentang perempuan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan untuk mengubah nasib berjuta-juta perempuan. Gagasan fungsionalisme dan positivisme dalam WID membuka kemungkinan bagi program WID untuk menguasai dan

Peta Sosial ekonomi Ummat

menghancurkan peluang cara perempuan untuk mengetahui. Pendidikan formal dan nonformal dikendalikan oleh tipe pengetahuan dominan untuk membentuk kesadaran rakyat. WID sebagai pengetahuan baru, muncul sebagai diskursus yang sangat berpengaruh. Mueller (1987) mengidentifikasi hubungan pengetahuan antara profesional pembangunan di Barat dan perempuan di Dunia Ketiga ini sebagai hubungan imperialisme.

Daftar Pustaka

- Fakih, M. (2000). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia* (2nd ed.). Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR (Anggota IKAPI).
- PNPM Mandiri Perkotaan. (n.d.). MODUL DASAR Komunitas: Tantangan Penanggulangan Kemiskinan. Retrieved from <http://kotaku.pu.go.id>